

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1996 dan puncaknya pada tahun 1997 mendorong pemerintah pusat mendelegasikan sebagian wewenang untuk pengelolaan keuangan kepada daerah sehingga diharapkan daerah dapat membiayai pembangunan dan pelayanan atas dasar keuangan sendiri Azhar (2008). Terjadinya gejolak sosial pada tahun 1999 memunculkan lahirnya otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah baik itu Kabupaten maupun Kota, untuk mengatur pemerintahannya sendiri baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan pengambilan keputusan serta mempunyai kewenangan luas dalam upaya mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki dengan tujuan menyejahterakan masyarakat (Mercy, 2013).

Pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan antar daerah di Indonesia Adi (2005). Kesenjangan ini muncul berkaitan dengan adanya sumbangan akan hasil eksploitasi sumber daya terhadap

pembangunan ekonomi yang hanya berada di pusat (Kuncoro,2004). Penelitian yang dilakukan oleh Bhinadi (2010) mengungkapkan bahwa adanya ketidakseimbangan pembangunan antara Jawa dan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik (Halacmi, 2005).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan belanja pembangunan (Fitriyanti dan Pratolo, 2009). Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah karakteristik pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Halim (2002) dalam Masdiantini dan Erawati (2016) menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota diluar Jawa-Bali.

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Chow, Ganulin, Haddad, dan Wiliamson, 1998). Wood (1998) mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai (1) Evaluasi

bagaimana program tersebut berjalan; (2) Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan; (3) Alat komunikasi dengan publik. Selain itu, tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang dapat terlihat dengan adanya pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Anwar Nasution (Antaraneews.com, 2007), bahwa masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hal tersebut berdampak pada buruknya penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan.

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Brujin (2002) dan Greiling (2005) pada pemerintah daerah di Jerman, serta Nolan, Moore, dan Chan (2004) di U.S.A dan Kanada. Di Indonesia, penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Hamzah (2009) yang meneliti mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengangguran dan kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan rasio efisiensi dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian mengenai karakteristik daerah telah dilakukan oleh Patrick (2007) yang diterapkan pada pemerintah daerah Pennsylvania. Penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menggunakan karakteristik pemerintah daerah sebagai

variabel independen. Karakteristik tersebut terdiri dari (a) budaya organisasi; (b) struktur organisasi; dan (c) lingkungan eksternal. Penelitian yang telah dilakukan oleh Suhardjanto, Rusmin, Mandasari, dan Brown (2010) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan wajib yang sesuai dengan SAP, dimana dalam menjelaskan karakteristik daerah menggunakan model yang sama dengan Patrick (2007). Penelitian yang dilakukan Suhardjanto et al. (2010) menggunakan struktur organisasi dan lingkungan eksternal dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dimana struktur organisasi diproksikan dengan ukuran daerah, kemakmuran, diferensiasi fungsional, usia, dan latar belakang pendidikan kepala daerah sedangkan lingkungan eksternal diproksikan dengan pembiayaan utang dan pendapatan pemerintah daerah.

Alasan mendasar penelitian ini dilakukan karena hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten, seperti yang terdapat dalam penelitian Masdiantini dan Erawati (2016) kemakmuran dan pendapatan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan dalam penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) kemakmuran dan pendapatan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari perbedaan hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih konsisten.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto et.al (2010) dengan Perbedaan dalam tiga hal. Perbedaan pertama, peneliti menggunakan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Perbedaan kedua, peneliti menggunakan Leverage dalam mengukur utang pemerintah daerah. leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai asset daerahnya. Daerah yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Dalam pemerintahan daerah, perhitungan rasio leverage penting dilakukan bagi kreditur dan calon kreditur dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditur untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya (Sumarjo, 2010). Perbedaan ketiga adalah variabel jumlah anggota DPRD dimasukkan dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah.

Penelitian ini sangat penting karena dapat menambah pengetahuan mengenai administrasi publik, teori organisasi, dan akuntansi pemerintahan. Lebih lanjut, Halacmi (2005) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja merupakan metode yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan uraian di atas, maka judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pendapatan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji pengaruh kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji pengaruh pendapatan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya penelitian di sektor publik di Indonesia.

2. Implikasi praktis

a. Pihak Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

b. Pihak Masyarakat

Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat dan stakeholder untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat landasan teori, kerangka konseptual, serta penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik sampling, pengukuran variabel, instrumen penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pengolahan data dengan alat analisis yang diperlukan, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang didukung oleh bukti-bukti dari hasil analisis data, keterbatasan, dan saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian, dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.